

Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah Multikultural

by Silfia Hanani

Submission date: 04-Jul-2019 07:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1149084341

File name: UKHAWAH_WATHANIYAH.pdf (744.41K)

Word count: 7458

Character count: 51173

MEMPERKUAT UKHWAH WATHANIYAH MELALUI PENDIDIKAN MULTI KULTURAL UNTUK MERAWAT NASIONALISME DITENGAH KEANEKARAGAMAN

21 Ilfia Hanani

IAIN Bukittinggi

silfia_hanani@yahoo.com

Abstrak

Indonesia negara multi etnis, budaya dan agama. Kondisi ini telah menjadikan Indonesia dalam keberagaman yang mempengaruhi dinamika dan imlikasi kehidupan bangsa kedalam dampak postive dan negatif. Implikasi negatifnya bisa dilihat dari konflik dan anarki yang terjadi di negara ini sebagai akibat yang dipicu oleh ketidakbisaan masyarakat hidup dengan keberagaman itu. Untuk mengatasi dampak negative ini diperlukan pendidikan multikultural, pendidikan yang membangun pemahaman yang harmonis dalam keberagaman itu. Pendidikan multikultural harus mampu menjelaskan perbedaan dengan memperkuat pendekatan-pendekatan keukhwah terutama ukhwah wathaniyah. Tanpa pendidikan multikultural itu, maka diprediksikan masyarakat lokal di Indonesia sulit untuk dapat menerima keberagaman yang muncul di negara ini, sehingga negara selalu berada dalam ancaman-ancaman intoleransi.

7

Abstract

Indonesia is a country with multi ethnics, cultural and religions. This develops Indonesia in diversity an multi dynamics with postive and negative implication. The negative implications are its potencial in crash, confflict and anarchy. In order to control this negative potencial multicultural education is one of the answers, education which builds wisdom to the dynamic understanding of colorful differences. However, multicultural educationis considered a new thing in Indonesia. Multicultural education should be able to explain the differences by strengthening the approaches of one approach ukhwah wathaniyah. In fact, without our awerness, multicultural education has existed and developed in local education in Indonesia because in the locality are the values of tolerance are maintained by community.

Keywords: Multicultural, Nationalism, ukhwah wathaniyah

Pendahuluan

23

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia dan sekaligus sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dan ditandai oleh keragaman budaya, bahasa, etnis dan agama. Dari catatan antropologis, negara yang mempunyai luas 1.900.000 km² ini, terdiri dari 13.000 pulau besar dan kecil dihuni oleh lebih kurang 300 suku bangsa, 200 macam bahasa daerah, dan beragam budaya lokal serta bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan (Koentjaraningrat, 1993). Keaneka ragaman yang dimiliki bangsa ini mempunyai potensi positif dan negative terhadap nasionalisme bangsa ini.

Potensi positif keanekaragaman merupakan energi untuk membangun kehidupan secara bersama, tanpa menaruh kecurigaan dan kebencian satu sama lain. Kebersamaan ini

merupakan modal sosial pembangunan bangsa.² Oleh sebab itu keberagaman tersebut harus dipelihara menjadi satu jalinan hidup yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dalam bertindak dan bersikap. Gandhi (1991:103) menyatakan perbedaan terbukti berguna selama ada toleransi. Toleransi dalam keberagaman harus dibangun melalui pendidikan, sehingga keberagaman-keberagamaan yang di Indonesia tidak terseret menjadi pendorong kekerasan, konflik, anarkhis dan kemurkaan.

Keragaman juga dapat menjadi ancaman, bila tidak terkelola dan tidak mendapatkan perhatian secara kemanusiaan. Ancaman itu bisa berupa konflik yang merugikan material dan nyawa manusia. Hal ini dapat dilihat dari fakta dan kejadian yang muncul di belahan dunia, termasuk di Indonesia seperti terlihat dari konflik antar umat beragama, konflik etnis dan sejumlah konflik horizontal lainnya.

Dalam konteks ini pendidikan multikultural diperlukan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga tidak menjadi anarkhisme, tetapi dapat dijelaskan sebagai aset yang berpotensi untuk membangun kehidupan bangsa secara bersama.² Pendidikan multikultural di Indonesia merupakan amanat daripada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2003, di mana " Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".

Pendidikan multikultural berperan dalam menjelaskan dunia ini bukan diwujudkan dalam satu tatanan dan bentuk budaya yang sama. Bagi negara-negara yang mempunyai keanekaragaman harus menyusun rancangan dan strategi dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini, sebab semakin menguatnya pemaknaan etnosentrisme dalam era globalisasi menuntut adanya upaya-upaya harmonisasi. Penguatan etnosentrisme telah menimbulkan perbenturan-perbenturan budaya yang merugikan manusia dan alam semesta. Menurut Hantintong (2001: 13), kebangkitan etnosentrisme ini yang menjadi "musuh" umat manusia era global ini. Pendidikan multikultural diperlukan untuk menjawab agar keberagaman tidak tercemar ke dalam perbenturan-perbenturan tersebut. Oleh sebab itu pendidikan multikultural merupakan sarana yang berpotensi untuk menjelaskan toleransi dalam keberagamaan. Pendidikan multikultural sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dunia yang sudah tercabik-cabik akibat penguatan pemaknaan etnosentrisme yang negatif, sehingga pertikaian-pertikaian telah menelan korban banyak manusia dan sekaligus memporak perandakan kedamaian dunia.

Pendidikan multikultural diharapkan mampu merespon perbedaan-perbedaan itu agar dapat dipahami sebagai suatu kesederajatan dan kesamaan. Pendidikan mempunyai peranan

yang besar untuk mewujudkan tersebut, karena pendidikan seperti dikatakan Paulo Freire, bukan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya, tetapi pendidikan adalah pendewasaan manusia yang berbudaya dan bermoralitas dengan menjunjung tinggi prinsip universalisme kemanusiaan (Freire, 2009:434). Maka sekolah sebagai institusi pendidikan harus melaksanakan pendidikan multikultural untuk menjelaskan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Salah satu tujuan dari pendidikan multikultural itu adalah, untuk memperkuat ukhwa wathaniyah sehingga semangat nasionalisme tidak pudar dalam mengelola bangsa ini kedepannya. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat keberagaman adalah menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari ditengah-tengah masyarakat global yang semakin kompleks dan majemuk serta heterogen.

Bagi bangsa Indonesia, penguatan terhadap ukhwa wathaniyah ini sudah sangat mendesak, mengingat semakin hari di negara ini kita semakin menghadapi anti keberagaman, sebagaimana kondisinya dapat dilihat akhir-akhir ini. Jika kondisi ini dibiarkan, diprediksikan bangsa yang dibangun oleh keberagaman tersebut akan mengalami *the end of history*. Sehubungan dengan itu, makalah ini menjelaskan *pertama* mengapa pentingnya pendidikan multikultural untuk konteks Indonesia, *kedua* bagaimana model dari pendidikan multikultural tersebut yang bisa memperkuat ukhwa wathaniyah dalam konteks keindonesiaan. *ketiga* bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural yang dapat memperkuat ukhwa wathaniyah tersebut. Untuk menjawab beberapa tujuan itu, telah dilakukan penggalan-penggalan informasi dan data melalui literatur dan data-data empiris berupa konflik dan sikap-sikap keberagaman yang muncul diengah-tengah masyarakat.

Studi Pustaka

Sepanjang tahun 2007-2013 telah terjadi ketidakharmonisan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konflik dan terjadi kedisharmonisan di negeri ini, yang dipicu oleh berbagai permasalahan, terutama oleh permasalahan keragaman yang tidak dimaknai dengan sikap toleransi. Mayoritas dan minoritas sukar untuk berdamai tetapi sering menyalut perbedaan menjadi sikap yang merugikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hal, bangsa ini telah dibangun oleh *founding father* dengan sikap torenasi dan keharmonisan sehingga bangsa ini bisa keluar dari jeratan kolonialisme. Hal ini bisa dilihat dari catatan sejarah suka duka dalam meletakkan dasar negara dengan piagam Jakartanya, sehingga atas dasar itu bangsa yang dihuni oleh keberagaman ini dapat tumbuh dalam semangat persatuan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu makna keberagaman itu semakin sempit saja diartikan, seakan-akan rasa toleransi yang dikonstruksi oleh pendiri bangsa itu mengalami

keterputusan, sehingga ditengah-tengah bangsa menghadapi peracturan global ini muncul tantangan berbagai konflik yang dipicu oleh keberagaman itu. Diantaranya dapat dilihat dari berbagai kasus-kasus konflik agama, etnis, dan seterusnya.

Dilihat dari 20 tahun terakhir ini eskalasi disharmonisasi di Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 2001, terjadi konflik etnis antara etnis Dayak dengan Madura yang menewaskan hampir 500 orang. Konflik Maluku yang memakan rentang waktu yang panjang selama 4 tahun menewaskan sekitar 8-9 ribu orang, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Tidak kalah penting pula adalah konflik pada tahun 1998, yang membuat ibu kota mencekam dan kisruh (Tempo, 21 Mei 2015).

Data-data konflik ini, khusus konflik dan intoleransi agama antara tahun 2007-2013 beberapa lembaga mencatat, seperti lapran SETARA institut, The Wahid Institute dan CRCS-UGM, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: DATA INTOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA DARI 2007-2013

Lembaga	Jenis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SERARA Institute	Tindakan	185	367	291	286	299	371	292
	Pesitiwa	135	265	200	216	244	264	222
The Wahid Institute	Kasus/peristiwa	-	227	228	196	277	274	245
CRCS-UGM	Kasus rumah ibadah	-	8	18	39	36	0	-

Sumber: Laporan Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI. 2013

Konflik umat beragama pada tahun 2014 masih saja terjadi, seperti terlihat dari kasus konflik penganut Syiah-Sunni, konflik pendirian rumah ibadah dan seterusnya. Realitas ini menunjukkan bahwa, keberagaman di Indonesia masih menjadi ancaman. Perbedaan-perbedaan belum dimaknai secara positif, tetapi masih saja dalam bingkai negatif. Bahkan pada tahun 2015 ini masih saja bergejolak konflik tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di Papua pembakaran masjid di saat umat muslim melaksanakan shalat idulfitri.

Begitu juga dengan keragaman etnis suku juga dijadikan sebagai pemicu konflik yang sangat menakutkan di Indonesia, karena dari beberapa kasus konflik antar etnis atau suku telah menewaskan banyak manusia dan material. Misalnya, konflik suku di Lampung pada akhir tahun 2012 dalam kurun waktu tiga hari saja laporkan menewaskan 14 orang. Jauh sebelum itu Bappenas juga telah mengeluarkan data periode 1990 hingga 2003, konflik di

Indonesia mengakibatkan kematian 10.758 orang, dengan proporsi terbesar yaitu konflik yang bersifat etnokomunal (antar etnik, agama dan sekte agama) sebesar 89.3% atau menelan 9.612 korban. Konflik terjadi di 14 provinsi dimana kasus tertinggi terjadi di Maluku Utara (72 insiden dan 2.794 korban jiwa); Maluku (332 insiden dan 2.046 korban jiwa), dan Kalimantan Barat (78 insiden dan 1.515 korban jiwa). Bahkan menurut catatan Institut Titian dari tahun 2008-2010 tercatat konflik di 4021 kasus terjadi di Indonesia, atau rata-rata pertahunnya terjadi 1340 kasus.

² Pada tahun selanjutnya 2014-2016 data-data kasus intoleransi itu tidak berhenti pula terjadi. Pada tahun 2014 misalnya, The Wahid Institute mencatat di Indonesia terjadi intolenasi beragama itu sejumlah 245 kasus Kemudian pada tahun 2014-2015 sebagaimana dilaporkan oleh Setara Institute Selama tahun 2014 terjadi 134 peristiwa dan 177 tindakan intoleran sedangkan pada tahun 2015 terdapat 197 peristiwa dengan 236 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (Tempo, 19 Januari 2017).
² Dari belahan dunia pun kasus-kasu yang demikian juga tengah terjadi. Pertikaian terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Di Timur Tengah sedang berkecamuk perang saudara, peran antar suku dan peran antar aliran keagamaan. Kemudian di Asia Tenggara juga tengah terjadi konflik antara Muslim Rohingya dengan umat Budha Myanmar. Tidak kalah penting lagi adalah kemunculan ISIS yang sangat membrutal. Di tulis dalam beberapa media masa pula setidaknya saat ini sedang terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Sekitar 38 juta jiwa terusir dari negeri kediamannya, kemudian paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah.

Dari kasus-kasu tersebut terlihat bahwa dunia global benar seperti dikatakan oleh John Naisbitt, sarat dengan pardok. Namun, dari data tersebut tidak dapat dipungkiri adalah bahwa perbedaan masih belum sepenuhnya dapat diterima sebagai suatu keniscayaan yang mesti dijaga dan dimaknai secara arif dan bijaksana. Masih ada yang menghela ke dalam ranah disharmonis.

Walaupun konsep dan teori multikultural sudah diperkenalkan semenjak tahun 1950-an di Kanada dengan istilah "multiculturalism", namun permasalahan konflik etnik, agama, ras dan ketidaksetaraan di dunia belum dimaknai sebagai suatu komponen postif yang harus dijaga dalam membangun kemanusiaan. Perbedaan itu, masih saja ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga perbedaan menjadi ancaman terhadap kehidupan manusia. Beberapa tesis yang memperkuat tentang ini dapat dilihat diantaranya dari kajian

Huntington tentang *Clash of Civilization*, dalam tesis ini menunjukkan penguatan-penguatan etnis di dunia yang diprediksi mengganggu kedamaian di dunia, karena masing-masing etnis yang menguat tersebut menimbulkan perbenturan-perbenturan satu sama lainnya. Minimal kata Huntington ada tujuh penguatan etnik, dima dibalik penguatan itu dikuatirkan akan mengalami perbenturan. Tujuh etnik itu adalah peradaban Jepang, Hindu, Islam, Ortodoks, Barat dan Amerika Latin (Huntington, 2000). Selanjutnya Huntington dengan merujuk kepada World Christian Encyclopedia menjelaskan pula, akibat-akibat perbenturan, khusus perbenturan antar umat beragama telah berpengaruh pada pilihan-pilihan seseorang untuk tidak beragama. Hal ini dapat dilihat dari data tahun ke tahun dimana jumlah orang memilih untuk tidak beragama selalu meningkat di dunia ini, pada tahun 1900 dari jumlah penduduk dunia hanya ditemukan 0, 2% orang tidak beragama. Tahun 1970 jumlahnya meningkat menjadi 15%, pada tahun 1980 menjadi 16,4% dan pada tahun 2000 menjadi 17,1% (Hanani, 2000:43).

Terkait konteks ini pula, Naisbitt (1994) meyakinkan bahwa dalam peradaban global ini menggelinding pardoksial dari apa yang diharapkan, seperti ditengah kuatnya himbauan dan gerakan perdamaian namun ancaman terhadap perdamaian itu menggelinding dengan kuat pula. Tidak heran ditengah-tengah kuatnya himbauan dan upaya perdamaian menguat pula konflik dan intoleransi yang mengguras kemanusiaan.

Kondisi-kondisi itu, terlihat dibelahan dunia saat sekarang ini, dimana konflik antara umat manusia yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan itu menjadi konflik horizontal yang mengancam keselamatan masyarakat di berbagai belahan negara, tidak terkecuali di Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh beragam etnis, budaya, agama dan seterusnya.

Ada bebera hal, yang menyebabkan terjadinya keberagaman itu menjadi ancaman, diantaranya bisa dilihat melalui teori negosiasi yang dikembangkan oleh Toomey (1999: 40), terjadinya ketidakharmonisan atau konflik disebabkan oleh rendahnya kualitas komunikasi atau tersumbat saluran komunikasi yang menjadi dalam keberagaman tersebut. Salah satu yang harus dikembangkan dalam keberagaman itu adalah manajemen konflik yang berbasis komunikasi yang menampilkan kesadaran antara yang beragam.

Dalam pandangan Gandhi, komunikasi itu disebutnya dengan sebagai alat untuk menumbuhkembangkan toleransi, sebab keberagaman itu bisa damai apabila ada dibangun toleransi di dalamnya. Toleransi itu dapat dikonstruksi melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui pendidikan di sekolah yang bisa dikembangkan melalui pendidikan multikutiral (Washim, dkk, 2005).

Sebagai bangsa besar dan sangat beranekaragam maka pendidikan multikultural sangat penting dibangun di Indonesia. Pendidikan multikultural tidak sekedar retorika demokrasi tetapi sudah harus menemukan konsep dan sistem pengajaran yang relevan dengan konteks negara ini. Keterlambatan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, telah terbukti menghilangkan nilai-nilai demokrasi, harmonisasi dan humanisme, sehingga keanekaragaman tersebut terseret dalam konflik yang sangat meruntuhkan nilai-nilai universal. Tidak dapat dipungkiri terjadinya perbenturan-perbenturan etnik, budaya, agama dan sebagainya di Indonesia, merupakan salah satu akibat dari tidak jelasnya konsep pengajaran pendidikan multikultural dan terlambatnya pendidikan tersebut diajarkan, sehingga sehingga bangsa ini kehilangan cara membangun keberagaman yang toleran dan kehumanisan.

Dalam konteks ini pendidikan multikultural harus mampu menjelaskan arti perbedaan-perbedaan dalam keberagaman yang ada sebagai satu hal yang harus dihayati dalam kerangka kesamaan dan kesederajatan. Oleh sebab itu, memelihara keberagaman ini, sama dengan merawat Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman (Azra, 2008).

Pendidikan multikultural, pada dasarnya membangun bertoleransi, saling memahami satu sama lain dan bukan saling curiga mencurigai (Parekh 2001). Pendidikan multikultural, bermuatan psikologis dalam membangun mentalitas, masing-masing individu. Untuk pendidikan multikultural memerlukan profesionalitas tenaga pendidik. Pendidikan multikultural di Indonesia tidak dapat diajarkan bahagian kulit luar seperti yang terjadi selama ini. Dimana anak didik hanya digiring untuk menghafal dari perbedaan-perbedaan yang ada.

Keanekaragaman, menurut Parekh harus dijelaskan dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masing-masing keanekaragaman tersebut. Malahan Gandhi menegaskan perlu dikemukakan dalam pendidikan multikultural adalah nilai-nilai moralitas yang universal, sehingga klaim kebenaran (*truth claim*) tidak menjadi gejala pada masing-masing individu. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi terhadap perbedaan. Di mana masing-masing perbedaan itu tidak dipandang mempunyai kelebihan atas satu sama lain, tetapi dimaknai sederajat dan sama sehingga tidak ada permusuhan di antaranya (Washim, 2005).

Kearifan dari masing-masing aneka ragam itu difahami sebagai modal sosial yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat berguna dalam membangun hidup bersama secara harmoni. Hal ini pula yang menyebabkan pentingnya pendidikan

multikultural di ajarkan di Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia bahkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan (Azra, 2008). Pendidikan multikultural, harus menjadi agenda untuk mendukung penyelamatan kebhinnekaan dan masa depan bangsa. Di samping itu, sebagai proses yang berguna untuk mewujudkan demokrasi, sehingga kebangkitan demokrasi di Indonesia tidak berbenturan satu sama lain, dan keanekaragaman etnis, budaya dan agama di Indonesia tidak merenggut masa depan bangsa ini.

Selama keragaman itu tidak bisa dipelihara keharmoniangannya, maka bangsa ini akan berada dalam ancaman-ancaman konflik yang dilatar belakangi oleh keberagaman itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia, misalnya di Myanmar yang menyisakan runtuhnya kemanusiaan akibat tidak terpeliharanya keberagaman dalam agenda kedamaian. Begitu juga di Indonesia, konflik Poso, Maluku, Ambon, Sampang Madura, Sampit dan seterusnya, adalah sebagai bentuk dari terkoyak-koyaknya perbedaan itu ke dalam konflik kemanusiaan, baru-baru ini kasus pembakaran rumah ibadah di Papua.

Untuk memahami perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu alamiah adanya, sangat dibutuhkan pendekatan-pendekatan kognitif, afektif dan psikomotirik untuk mencermatinya, sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam keberagaman tersebut. Salah satu yang harus dibangun adalah pendidikan multikultural pemahaman dan pemaknaan perbedaan satu dengan yang lain. Pendidikan multikultural pada dasarnya sudah diawali di Canada pada tahun 1971, dimana pemerintahan Federal memaksakan masyarakat untuk memahami keberagaman agama, etnis, rasa dan budaya sebagai komponen yang harus dihormati, bukan saling bermusuhan.

Pendidikan multikultural merupakan sebagai bentuk pendewasaan manusia dalam memahami kondisi-kondisi yang budaya, agama dan seterusnya yang beragam. Tidak saling bermusuhan dan menaruh curiga dalam keberagaman tersebut. Membangun toleransi dalam keberagaman budaya, agama, etnis dan seterusnya. Menurut Anderson dan Cusher (1994:320) pendidikan multikultural sebagai sarana fungsional untuk membangun keharmonisan dalam keberagaman, karena dibangun dengan pendekatan keharmonisan yang mengutamakan pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan agama, budaya, etnis, gender dan seterusnya.

Di Indonesia pendidikan multikultural sudah ada berkembang semenjak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dapat dibuktikan dari penghilangan kata “syariat Islam” dalam sila pertama dari Pancasila itu, dengan tujuan untuk mengakomodasi keberagaman di negara ini. Pendiri bangsa sudah meyakinkan bahwa Indonesia bangsa besar

yang dihuni oleh beragam-ragam agama, budaya, etnis dan seterusnya untuk itu diperlukan toleransi untuk merawatnya.

Malahan toleransi Pancasila dikembangkan di Indonesia menjadi model toleransi yang diakui oleh pengkaji-pengkaji di dunia, seperti terungkap dalam Cristian Conference of Asia yang berlansung di Manila pada tahun 1996, dimana di toleransi di Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila itu dimana agama dan aliran-aliran dilindungi oleh negara, negara mengakomodasi perbedaan itu dalam bingkai Bhinneka Tuggal Ika (Wasim, 2005: 116).

Namun, toleransi itu pecah di Indonesia karena terlambat mengembangkan pendidikan multikultural, esensialnya terputus dilintas generasi sehingga negara yang berpenduduk 250 juta ini menjadi negara yang di dalamnya tidak ramah dengan perbedaan. Keterputusan pewarisan nilai-nilai toleransi itu telah dibayar mahal oleh negara dengan berbagai konflik horizontal.

Sekarang, untuk menghindari perbenturan etnis, agama, budaya dan seterusnya maka harus dirancang pendidikan multikultural, sebab kekuatiran dimasa yang akan datang jika keberagaman itu tidak pelihara resiko konflik dan disintegrasi akan terjadi di Indonesia memiliki luas 1.900.000. km² atau sekitar:

- a. 57 kali luas Belanda
- b. 5 kali luas Jepang
- c. 4 kali luas Prancis
- d. 2 kali luas Pakistan
- e. Lebih separoh luas India

Dengan luas Kalimantan 736.000 km², Sumatera 440.000 km², Irian Jaya bagian barat dari Guinea Baru: 422.000 km², Cilebes atau Sulawesi 190.000 km² dan Jawa 132.000 km² atau seperempat dari luas Paris. Selama ini tidak ada konflik yang tidak menyisakan kehancuran, oleh sebab itu sangat diperlukan dihindari konflik akibat keberagaman itu dirancang pendidikan multikultural.

Ada beberapa resiko masa depan bagi bangsa Indonesia, jika pendidikan multikultural itu tidak dikembangkan:

1. Tercerabutnya nilai-nilai toleransi yang selama ini yang dibangun dalam sejarah perjuangan bangsa, sehingga Indonesia kehilangan model toleransi itu. Jika Indonesia kehilangan model toleransi itu maka negara yang memiliki keberagaman ini, diprediksikan mempunyai masa depan yang suram. Hal ini sudah mulai terbukti, dimana ancaman terbesar dihadapi oleh negara sekarang adalah konflik antar agama, etnis, suku dan budaya tersebut, minimal datanya dapat dilihat pada Tabel 1 di atas.

2. Terancamnya harmonisasi sebagai modal mutlak dalam sebuah negara. Kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas keharmonisan dalam negara tersebut. Pembangunan bisa berjalan apabila ada, keharmonisan tersebut. Ketidakharmisan adalah ancaman dari segala aspek kebangsaan.
3. *Genocide* mendramatisir, Indonesia sebagai negara multi etnis, budaya, agama dan seterusnya akan sangat mudah masyarakat di dalamnya mengembangkan isu anti etnis lain, anti agama lain sehingga pembunuhan dan penghabisan etnis-etnis yang sangat mudah dilakukan oleh kelompok mayoritas. Realitas ini bisa dilihat dari konflik Maluku, Poso, Ambon dan Sampit-Madura.
4. Tribalisme mayoritas terhadap minoritas, kelompok-kelompok mayoritas menunjukkan kekuasaan dan tribal terhadap minoritas. Mayoritas mengklaim sebagai pemilik kebenaran, sehingga minoritas selalu diposisikan sebagai kelompok yang tidak bisa diterima. Kondisi ini di Indonesia terlihat dari kasus-kasus intoleransi yang berkembang di Indonesia.
5. Ancaman disintegrasi, terpecahnya wilayah kesatuan Indonesia akibat sikap egoisme kultural, agama, budaya dan sebagainya.

Untuk itu, di Indonesia sangat diperlukan pendidikan multikultural tersebut, sebagai bebentuk kesadaran kolektif untuk membangun masa depan bangsa. Pendidikan multikultural harus masuk ke dalam ranah sekolah sebagai bentuk pewarisan toleransi yang dikembangkan oleh pendiri bangsa. Dalam konteks ini, perlu dalam pendidikan multikultural mendapatkan perhatian adalah masalah ukhwah wathaniyah.

Ukhwah whaniyah, sudah diperkenalkan dikembangkan nilai-nilainya oleh Nabi Muhammad, terutama ketika Nabi berada di Madinah. Untuk membangun Madinah yang madani Nabi telah melakukan kesefahaman untuk menjaga ukhwah wathaniyah itu dengan Piagam Madinah. Kemudian, Madinah menjadi kota rujukan sebagai kota toleran, kota yang berperadaban yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat mengutamakan kepentingan kemajuan dengan landasan kemanusiaan.

Ibn Khaldun (1332-1406) sekitar abad ke-17, telah mencoba kembali meredefinisikan ukhwah wathaniyah ini kedalam konsep solidaritas, persahabatan manusia dimuka bumi atas dasar kemanusiaan dan kesejatiannya memaknai sebagai sebangsa. Konsep ini kemudian dikembangkan kedalam analisis jatuhnya banggunya budaya di dunia ini, melalui teori siklus. Jatuh banggunya sebuah kebudayaan di dunia sering dipengaruhi oleh keterledoran manusia dalam memaknai konsep kesetaiannya sebagai sebuah bangsa yang dibangun dengan semangat solidaritas itu.

Solidaritas ini kemudian diterjemahkan kedalam berbagai makna, ada yang mengartikan sebagai toleransi. Pemaknaan ini dilandasi oleh keinginan sebuah bangsa untuk maju tidak dapat hanya dilakukan dengan pemaksaan oleh sekelompok saja, tetapi bagaimana sebuah bangsa itu bisa mengases kepentingan semua kelompok maka solidaritas-toleransi itu menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa.

Apalagi dalam menghadapi masyarakat global yang semakin kompleks dan semakin mempunyai pergerakan yang tinggi, maka keberagaman dan kompleksitas itu semakin tidak terelakkan. Maka persinggungan atau *clash* antara keberagaman juga semakin mudah terjadi. Dalam konteks bernegara *clash* itu dapat diatasi dengan penguatan ukhwa wathaniyah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Model Pendidikan Multikultural Memperkuat Ukhwa Wathaniyah dalam Konteks Keindonesiaan

Dalam konteks ke-Indonesiaan perlu dijelaskan fokus dari pendidikan multikultural tersebut, mengingat keberagaman di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan ditandai dengan kondisi lokalitas-lokalitas yang ada di Indonesia. Dimana masing-masing lokalitas tersebut memiliki kekuatan psikologis lokal yang terikat dengan budaya, agama, ras dan seterusnya. Oleh sebab itu, tidak mungkin fokus pendidikan multikultural di Indonesia mengabaikan faktor psikologis lokalitas yang terikat oleh berbagai dimensi tersebut. Fokus itu pun pada dasarnya sudah disatukan dalam visi kebangsaan yang tercermin di Pancasila dan kesatuan kesadaran dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, namun penjabaran fungsional masih sangat diperlukan dalam rangka menjaga keberagaman tersebut. Ada etika ekologis lokalitas yang perlu diperhatikan juga, sehingga lokalitas yang terikat oleh etnis, budaya dan agama itu satu sama lainnya tidak mengalami perbenturan dan konflik.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural mampu membangun konsensus-konsensus yang mengikat perbedaan tersebut. Konses itu terdialogkan dan disepakati. Ada negosiasi-negosiasi yang sudah dikomunikasikan dan kemudian disepakati menjadi kepentingan bersama. Terkait dengan hal ini maka menurut Tataley (Washim, dkk2005: 121) minimal ada empat hal pokok yang perlu dikembangkan dalam pendidikan multikultural yakni:

1. Komitmen terhadap sebuah kultur anti kekerasan dan menghormati kehidupan
2. Komitmen terhadap sebuah kultur solid dan terhadap tatanan ekonomi yang adil

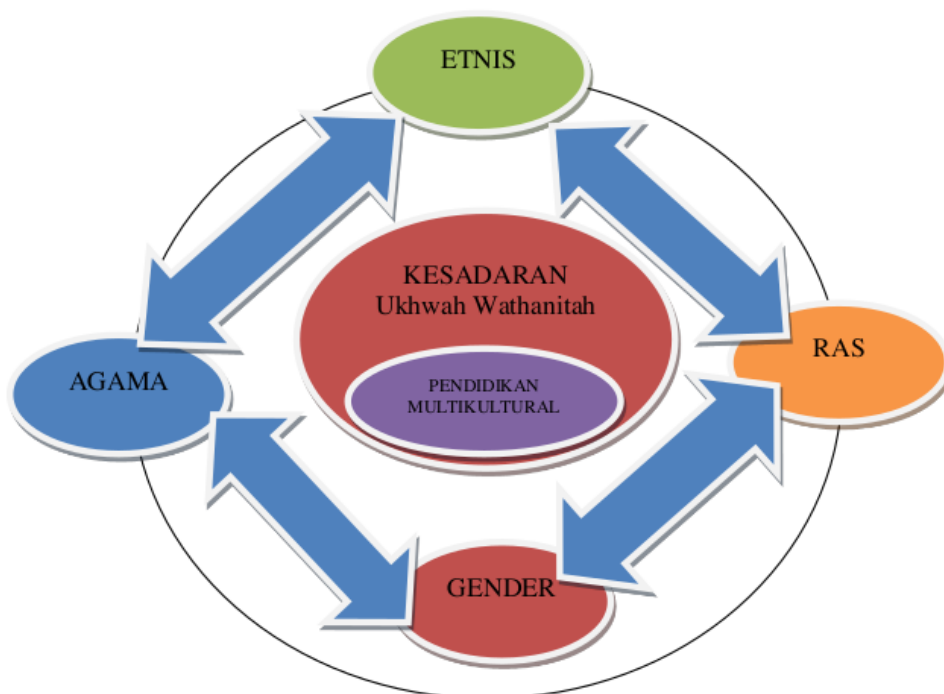
3. Komitmen terhadap sebuah kultur yang toleran terhadap kehidupan untuk saling percaya
4. Komitmen terhadap sebuah kultur yang menjunjung persamaan hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Di sini, semakin jelas bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa terpelihara dengan harmonis, diperlulukan komitmen, itu menghasilkan kesadaran terhadap sikap toleransi. Oleh sebab itu pendidikan multikultural harus mendesain fokus pengembangannya pada kesadaran terhadap komitmen tersebut. Fokus pendidikan multikultural itu yang beraitkan dengan ukhwah wathaniyah itu harus mampu menjelaskan keharmonisan, minimal dalam konteks ini ada lima hal yang harus dijelaskan berkaitan dengan materi-materi ukhwah wathaniyah ini, yakni:

1. Etnis, Ras dengan etnis dan Ras yang lain
2. Etnis dengan agama
3. Agama dengan agama yang lain
4. Gender
5. Gender, agama dan etnis

Terkait dengan konteks etnis menjadi fokus dari pendidikan multikultural disebabkan oleh Indonesia berdiri kokoh di atas ribuan etnis-etnis tersebut. Oleh sebab itu, etnis ini harus dijaga satu sama lain supaya tidak terjadi perbenturan dan konflik. Pemahaman terhadap keragaman etnis ini menjadi fokus dalam pembelajaran pendidikan multikultural, menyadarkan bahwa adanya keberadaan orang lain di luar kelompok. Begitu juga dengan agama dan etnis, satu sama lain bisa didialogkan dengan harmonis.

Pada dasarnya fokus daripada pendidikan multikultural dalam konteks keindonesiaan merangkun keaneka ragaman yang beragam-ragam pula, terkait Indonesia dibangun di atas keanekaragaman itu. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural harus mampu menjelaskan kesadaran keharmonisan lintas keragaman yang beraneka itu. Dalam konteks ini, fokus pendidikan kultural yang dapat memperkuat ukhwah wathaniyah itu dapat dintegritaskan kedalam 5 pengembangan nilai dan sikap, yaitu fokus etnis, agama, ras dan gender, 29 sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Fokus dan Relasi Pendidikan Multikultural di Indonesia

Terkait dengan fokus ini pula Tilaar (2005) berpendapat pendidikan multikultural tidak hanya terfokus pada penjelasan kepada keberagaman rasial, agama dan kultural domain atau mainstream tetapi dibalik itu yang lebih penting adalah , pemahaman sikap "peduli" dan mau mengerti perbedaan (difference), atau "politics of recognition" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas juga diperlukan. Dengan demikian pendidikan multikul harus menghilangkan konsep pemaknaan kelompok yang satu lebih dari yang lain atau konsep yang lain salah. Oleh sebab itu perlu dalam pendidikan multikultural bingkai sosolidaritas kebangsaan atau ukhwah wathaniyah itu.

Terkait dengan Indonesia yang dibangun di atas keberagaman itu, sekarang bagaimana sikap untuk menjaga keberagaman tersebut. Pendidikan multikultural, minimal harus menawarkan sikap tersebut melalui pengembangan pengajaran pendidikan multikultural di sekolah-sekolah. Sikap itu seperti yang dimaksudkan oleh Gandhi, sikap toleransi. Selagi toleransi itu masih ada, maka keberagaman itu akan terawat dan terjaga.

Ketika pendidikan multikultural masuk kedalam sistem pembelajaran, maka perlu dilakukan pengembangan pendidikan multikultural itu sendiri dimana basisnya tidak bisa dilepaskan dari konteks dan kondisi keindonesiaan, tidak dapat diadopsi secara serta merta dari dunia luar, seperti yang dikatakan oleh Dove (1985) bahwa Indonesia negara yang

memiliki lokalitas yang beragam-ragam, budaya, ras dan sebagainya. Dimana masing-masing lokalitas itu punya kearifan tersendiri-sendiri pula. Termasuk dalam memahami keberdaan lokalitas lain dengan keberagaman tersendiri pula.

Keberagaman-keberagaman dan cara pandang yang berbeda-beda itu pula yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, sebenarnya proses kemerdekaan hal itu sudah ditunjukkan dengan sikap toleransi pendiri bangsa dan bahkan jauh hari sudah diciptakan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap-sikap itu semua menunjukkan bahwa ukhwah wathaniyah itu sebagai salah satu fondasi dalam membangun bangsa yang majemuk dan multikultural ini.

Fokus pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan budaya sebagai satu konunitas perbedaan, tetapi mengajarkan pemaknaan esensi dari keragaman tersebut. Sikap moralitas sangat ditekankan untuk membangun lahirnya pemaknaan kesejatan daripada perbedaan tersebut atau sikap yang mampu memberikan makna toleransi terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural harus membangun pengajaran moralitas, etnisitas, kesederajatan dan nilai-nilai universal.

Sehubungan dengan itu, pengembangan sikap pendidikan multikultural dapat dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis ini dapat diadopsi dari teori sistem yang dikemukakan oleh Parsons (G. Parsons menjelaskan, untuk melaksanakan satu kerangka kerja sikap budaya, diperlukan empat persyaratan untuk dipenuhi, dimana keempat-empat persyaratan itu harus saling terintegrasi. Empat persyaratan itu disingkat oleh Parsons dengan A-G-I-L, dengan singkatan masing-masing adalah: *A=Adaptation, G=Goal Attainment, I=Integration, L=Latent pattern maintenance*.

Keempat persyaratan ini dalam pengembangan pendidikan multikultural dapat beroperasional sebagai berikut:

Tabel 2:
OPERASIONAL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

No	Dimensio sistem	Diskriptif Pelaksanaan Pendidikan Multikultural
1	<i>Adaptation</i>	Membangun pendidikan dengan kurikulum dan cara-cara yang dapat dimaknai dan difahami oleh anak didik. Pendidikan multikultural memperkenalkan sikap toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain.
2	<i>Goal Attainment</i>	Melakukan pendidikan multikultural dengan tujuan

		untuk membangun sikap dan paradigma anak didik yang tidak skeptis atau eksklusifisme. Anak didik harus mampu menghargai diluar yang dimilikinya bukan sebagai musuh. Harus mampu memaknainya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan di jaga.
3	<i>Integration</i>	Pengajaran pendidikan multikultural harus diajarkan secara bersama tidak memisah-misahkan satu sama lain. Anak didik harus belajar budaya lain dan harus diberi pengetahuan budaya lain itu bukan musuh dan dimusuhi.
4	<i>Latent pattern maintenance</i>	Pendidikan multikultural harus dibangun berdasarkan kondisi sosial budaya banga. Tidak hanya diadopsi belaka dari negara-negara maju.

Pendidikan multikultural sebagai pendidikan moral dan penanaman nilai-nilai pada anak didik, maka sekolah merupakan *basic* dari pelaksanaan pendidikan multikultural ini. Pendidikan multikultural harus dilaksanakan semenjak dini secara profesional dengan pengajaran yang tepat sasaran. Masalahnya kesadaran akan toleransi sangat ditentukan oleh kemampuan dunia pendidikan menanamkan nilai-nilai toleransi tersebut. Sekolah merupakan *agent* transformasi dari penanaman nilai-nilai dan moral tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ivan Illich, dimana sekolah harus mampu membeaskan keterbelakangan manusia dari kemanusiaan. Sekolah aset yang potensial untuk membangun manusia yang berprilaku kemanusiaan (Illich, 1996). Peran sekolah, tidak hanya menjadi sebagai pembangun kecerdasan intelektualitas tetapi juga mewujudkan kecerdasan moralitas, sebagaimana pendidikan itu sendiri membangun manusia dalam tiga aspek yang terintegral, aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

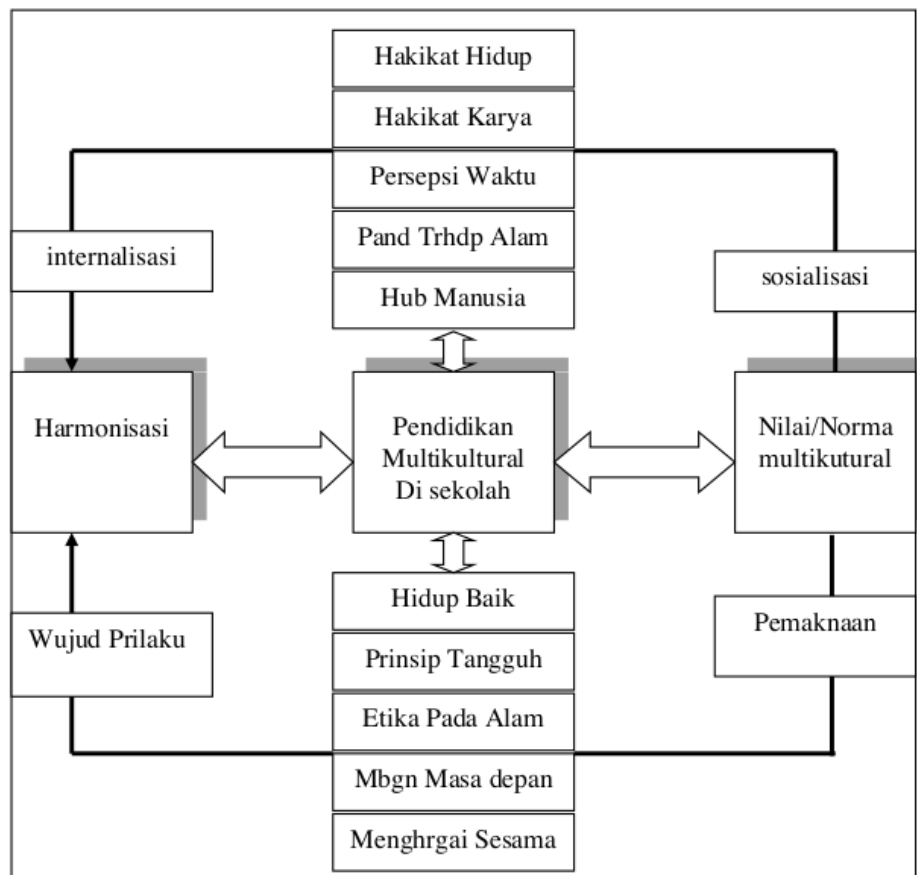
Dari pendidikan multikultural itu, muncul sikap moral yang menimalisir prasangka dan curiga, sikap kebencian terhadap kelompok lain, kebencian terhadap agama lain dan sikap etnosentrisme yang mengecilkan makna keberadaan etnis yang lain. Untuk itu pendidikan multikultural harus dikembangkan dengan pendekatan moralitas tersebut, pendekatan moralitas dalam pendidikan dapat dielaborasi dari berbagai aspek. Dari aspek antropologi, pendidikan moralitas ini bisa dijelaskan dari segi pemkanaan-pemaknaan universal yang dikembangkan oleh Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2000), dengan pendekatan masalah masalah dasar yang dihadapi oleh manusia secara universal dimana pun, dan

dikembangkan dengan orientasi nilai budaya. Lima masalah dasar universal itu adalah tentang pemaknaan ¹⁰ hakikat hidup, hakikat karya, persepsi tentang waktu, terhadap alam dan hubungan manusia sesama. Kelima ¹¹ hal dasar itu akan dibangun dan dibentuk sesuai dengan tujuan dasar kehidupan, tujuan dasar manusia dalam membangun peradaban. Parsons (1968), dalam teori fungsionalnya menyebutkan keseimbangan dalam lima masalah kehidupan manusia, itu yang dapat membangun keteraturan sosial. Sedangkan budaya yang sudah terbangun dan eksis dalam satu komunitas atau etnis, selalu mengarahkan, menuntun dan membimbing pada pemiliknya. Inilah yang dikatakan *value* (nilai) konsep tentang sesuatu hal yang diinginkan.

Nilai itu adalah ajaran dan normative yang harus ditafsirkan sehingga ¹¹ melahirkan satu perilaku, atau tindakan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai. Parsons (1998:18) seorang perekonstruksi teori struktural fungsional menyatakan, bahwa keseimbangan atau keteraturan atau kestabilan akan terwujud apabila ada penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut, nilai-nilai itu tidak terkesampingkan karena nilai itu menjadi *word view* dan telah disepakati sejak lama. Nilai-nilai tidak pernah memberikan pertentangan, tetapi lebih dominan membangun keadaban.

Pengembangan nilai-nilai moralitas sangat berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan multikultural komponen pendidikan harus mampu menginternalisasikan pemaknaan perbedaan, kekegaragaman ke dalam perilaku dan sikap peserta didik. Di sekolah pendidikan multikultural dapat disusun langkah-langkah internalisasi itu dengan pemahaman konsep dengan praktik yang dibiasakan. Tidak cukup dengan teoritik atau pengenalan konsep belaka. Kesalahan-kesalahan dalam pendidikan multikultural yang terjadi adalah dimana sekolah tidak mampu menginternalisasikan pemahaman itu menjadi tindakan moralitas.

Dalam internalisasi nilai-nilai itu, lingkungan sekolah menjadi media yang tidak terpisahkan. Kesiapan guru dalam merancang dan menyusun pengembangan pendidikan multikultural sangat diperlukan. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam internalisasi nilai-nilai dalam pendidikan multikultural itu adalah adanya media pembiasaan yang membangun kesadaran. Di sekolah-sekolah muridnya memiliki heterogenitas etnis, agama, dan budaya tentu media pengembangan pembelajaran tentu banyak media yang harus dirancang dan pembiasaan yang dilakukan oleh guru. Untuk itu, sekolah-sekolah yang memiliki keanekaragaman yang dimiliki oleh siswa, setidaknya untuk merancang pendidikan multikultural dapat dibantu melalui matrik sebagaimana dikembangkan oleh Hanani (2013:122) seperti dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2: Pengembangan dan internalisasi nilai-nilai Pendidikan Multikultural

2. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Berukhwah Wathaniyah Dalam Konteks Keindonesiaan

Pada dasarnya, materi pendidikan multikultural sangat tergantung pada konsep perbedaan atau keanekaragaman. Keanekaragaman yang berada pada lingkungan sendiri sangat menentukan terhadap model dan materi untuk kebijakan pendidikan multikultural tersebut. Misalnya, dalam konteks keindonesiaan jelas kebijakan penyusunan materi dan konsep dari pendidikan multikultural itu harus disesuaikan dengan keindonesiaan itu sendiri. Selama ini telah dikembangkan beberapa model pendidikan kultural tersebut, namaun menurut Achmad Fedyani Saifuddin (*Kompas* 21 Januari 2006) ketiga-tiga model itu belum cocok untuk kasus multukultural di Indonesia, tiga model itu adalah:

¹
Pertama Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang—bukan kolektif—berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. *Kedua*, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (founders). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing. *Ketiga*, model multikultural- etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.

Sehubungan dengan ini, Dove (1985) menekankan pengajaran tentang budaya harus disesuaikan dengan konteks lokal, tidak dapat serta merta mengadopsi dari cara dan sistem negara-negara maju saja, karena permasalahan lokal yang dihadapi oleh satu daerah atau wilayah belum tentu sama dengan permasalahan di negara-negara lain tersebut. Pendidikan multikultural harus dikembangkan ⁷ sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan permasalahan di tanah air. Oleh sebab itu pendidikan multikultural di sekolah harus dibangun dengan pendekatan-pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat Indonesia, yakni mendekatkan masyarakat Indonesia dengan persaudaraan atas kepentingan kebangsaan.

Dalam kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, nampaknya model pembelajaran pendidikan multikultural yang menekankan kepada prinsip ukhawah wathaniyah itu setidaknya harus ada mengandung konten tentang empat hal berikut ini:

1. Pemaknaan toleransi dan perbedaan keanekaragaman
2. Universalisme kemanusiaan
3. Keberagaman sebagai khazanah budaya
4. Relasi damai

Konten tersebut harus dilingkupi oleh bingkai-bingkai relasi media yang dibangun berdasarkan khazanah bangsa Indonesia. Pancasila bisa dijadikan pijakan dalam merekat bingkai tersebut, jika dikonstruksi menjadi model dari toleransi dalam pembelajaran pendidikan multikultural, sebab bagaimana pun dalam konteks Indonesia sangat dibutuhkan model konstruksi tersebut. Keterujian Pancasila dalam konteks keindonesiaan, bisa dilakukan penggalian nilai-nilai moralitas multikultural di dalamnya. Namun, pendekatan itu belum sepenuhnya dieksplorasi dan ditambah dengan berbagai sikap yang menghambat dari pendidikan multikultural tersebut. Diantara keberagaman itu adalah, masih adanya permasalahan-permasalahan di bawah ini:

1. Ego mayoritas-minoritas
2. Etnosentrisme dan rasisme
3. Kungkungan fanatisme umat beragama
4. Kungkungan Fundamentalisme
5. Kungkungan eksklusifisme umat beragama

Ego mayoritas-minoritas di berbagai belahan dunia masih saja terjadi bahkan menjadi ancaman yang mendasar dalam perdamaian dunia. ¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus konflik yang terjadi. Di Indonesia, persoalan pelik ini masih terasa adanya. Dalam catatan-catatan konflik keagamaan misalnya, ego mayoritas kelompok aliran agama yang satu dengan yang lainnya telah mendramatisir sikap intoleransi. Pada wilayah-wilayah tertentu misalnya sangat tidak bisa menerima kehadiran simbol-simbol dan keberadaan agama lain di lokasi mayoritas. Menurut Hanani (2013) kondisi ini menyebabkan tidak suksesnya pembinaan harmonisasi umat beragama di negara ini, pertama masalah pemaknaan mayoritas dan minoritas beragama yang masih kentara dalam dinamika sosial kehidupan. Masing-masing pemeluk agama, tidak memilah-milah pemaknaan antara konteks sosial keagamaan dan konteks *ketauhidan*, sehingga jurang sosial dan kemanusiaan diabaikan oleh pemeluk agama. Ketiga, terjadinya politisasi agama secara radikal yang tidak menoleh ajaran agama sebagai pembangun karakter kedamaian di muka bumi. Corak seperti ini terjadi, sebagai akibat

adanya terjadi pemisahan pemaknaan agama sebagai sistem keyakinan dengan praktik agama sebagai moral komunitas pemeluknya. Durkheim (1962), dalam konteks ini mensinyalir sebagai salah satu penyebab terjadinya *anomie* atau konflik antar umat beragama tersebut .

Durkheim merekomendasikan agama merupakan sistem sosial yang mengikat tindakan, sehingga ia menjadi sumber moralitas penganut atau komunitasnya. Oleh sebab itu, agama tidak cukup dihayati sebagai sumber ajaran, tetapi agama merupakan holistik yang membangun karakter kehidupan dan peradaban (Durkheim, 1962). Penghelaan ajaran agama menjadi ajang pembunuhan, merupakan salah satu akibat dari keterpisahan sistem ajaran dengan moral (Ritzer, G. & Goodman, J. D. 2005).

Konflik antar umat beragama, tidak pernah kunjung selesai juga dipengaruhi oleh tidak terperhatikannya oleh berbagai kalangan adanya model-model toleransi beragama yang telah berkembang dalam masyarakat. Model-model tersebut tidak dipelihara, sehingga ketika terjadi politisasi agama, model-model yang telah ada itu mudah terusik dan kemudian hilang. Kehilangan model-model toleransi berbasis masyarakat ini, tidak dapat disangkal menjadi hilangnya model bangunan kemanusiaan yang ditengah-tengah kehidupan yang multikultural ini.

Reputasi mayoritas akan menjadi bumerang oleh kelompok minorotas beragama, atau sebaliknya, karena tradisi toleransi itu telah hilang maka kehidupan umat beragama mudah dibenturkan. Isu agama dijadikan pemicu konflik antar umat beragama. Mudahnya terjadi perbenturan agama juga tidak lepas dari hilangnya model-model toleransi yang dibangun oleh umat beragama tersebut.

Prilaku-prilaku keagamaan seseorang bisa menjadi tribal, akibat adanya tekanan-tekanan dari kepura-puraan yang dilakukannya, sebagai bentuk perlawanan-perlawanan ketidaksesuaian yang diperankannya. Tekanan-tekanan emosional, menjadi salah satu penyebab terjadinya seseorang atau komunitas bertindak di luar kesadarannya. Perlawanan akan menjadi fungsional dalam membangun perubahan.

Dalam pandangan penganut teori konflik seperti Marx, sesungguhnya konflik yang terjadi itu merupakan sebagai salah satu bentuk daripada cara yang digunakan oleh seseorang atau komunitas untuk keluar dari tekanan-tekanan yang diterimanya akibat paksaan-paksaan yang diarahkan kepadanya (Ritzer & Goodman, 2005; 193). Oleh sebab itu, tekanan-tekanan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain, bisa menjadi perjuangan kelas atau kelompok yang melahirkan fenomena atau situasi yang baru.

Berbeda dengan penganut fungsional, perbedaan penampilan realitas dengan suasana bathin itu merupakan suatu bentuk daripada jalan keluar untuk mendapatkan eksistensi,

34 sehingga harus tunduk dan patuh terhadap tuntutan yang ada agar dapat menjadi eksis. 25 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Parsons bahwa untuk tetap menjadi eksis perlu adanya keseimbangan dengan memahami perilaku atau tindakan yang ada diluar diri atau kelompok (Haryanto, 2012; 21).

Panggung sandiwara pada satu sisi dilakukan adalah untuk membangun ketahanan atau eksistensi atas tekanan-tekanan, sehingga memaksa munculnya perilaku atau tindakan kepura-puraan. Kepura-puraan itu, untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak-kehendak tuntutan mayoritas. Pada sisi lain, juga sebagai sumber konflik baik secara terselubung maupun terang-terangan. Dalam toleransi agama, orang bisa saja melakukan perbedaan-perbedaan tindakannya untuk bisa bertahan dalam tekanan-tekanan itu.

Kehidupan umat beragama dalam masyarakat yang multi etnik, tekanan-tekanan itu harus diselesaikan dan dimediasi, salah satunya melalui dialog-dialog keagamaan dan budaya. Dialog-dialog tersebut minimal dapat meminimalisir keruciragaan-kecurigaan dalam kehidupan beragama, kesalah fahaman dan seterusnya. Perilaku-perilaku keagamaan sebenarnya tidak dapat dimanipulasi, karena perilaku keagamaan itu merupakan esensialnya berasal dari norma-norma yang dicantumkan dalam ajaran agama itu sendiri. Namun, dimensi universalisme dapat menjadi acuan dalam tindakan manusia, dimana manusia harus memiliki saling pengertian, saling memaknai keberadaan orang lain terkait dengan menjalankan kehidupan yang lebih harmonis dan damai.

27 Dalam masyarakat dunia yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan ras yang dibatasi oleh geografis, ideologi dan seterusnya selalu dalam berinteraksi mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas merupakan kelompok dominan dan minoritas merupakan kelompok yang memiliki bagian kecil dari dalam kedominan itu. Tidak hanya terkait sekedar perbedaan mayoritas dan minoritas tersebut, tetapi implikasi dibalik mayoritas dan minoritas itu adalah adanya dominasi-dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Dominasi ini mayoritas terhadap minoritas ini bisa terjadi salah satunya diakibatkan oleh faktor jumlah yang lebih banyak dalam group, sehingga ia keberadaannya lebih 3 mempengaruhi jika dibandingkan dengan minoritas. Oleh sebab itulah kaum minoritas yang mengajukan pendapat yang bertentangan dengan mayoritas cenderung lebih berpengaruh 3 daripada minoritas yang gagal untuk membantah mayoritas.

Mayoritas dan minoritas dapat berdampak negatif bagi masyarakat baik bagi kaum minoritas maupun pada kaum mayoritas itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya perilaku diskriminatif yang muncul karena menganggap kelompok lain sebagai *out-group* yang merupakan lawan bagi mereka terutama bagi kaum minoritas yang dianggap asing oleh kaum

mayoritas. Adanya perilaku diskriminatif ini menimbulkan konflik sosial dimana salah satu pihak kelompok merasa dirugikan dan ditindas.

Dalam konsep mayoritas dan minoritas, berkembang pula konsep *ingroups* dan *outgroups* yang menjadi dasar kekuatan kekuasaan, perjuangan, identitas dan seterusnya. Konsep-konsep tersebut mempengaruhi perlakuan-perlakuan di dalam realitas antar komunitas. Perbedaan perlakuan itu, akan menimbulkan tekanan-tekanan dan pemaksaan-pemaksaan terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas bisa jadi melakukan tekanan itu penuh dengan kepura-puraan tujuannya adalah untuk bertahan dan eksis ditengah-tengah mayoritas.

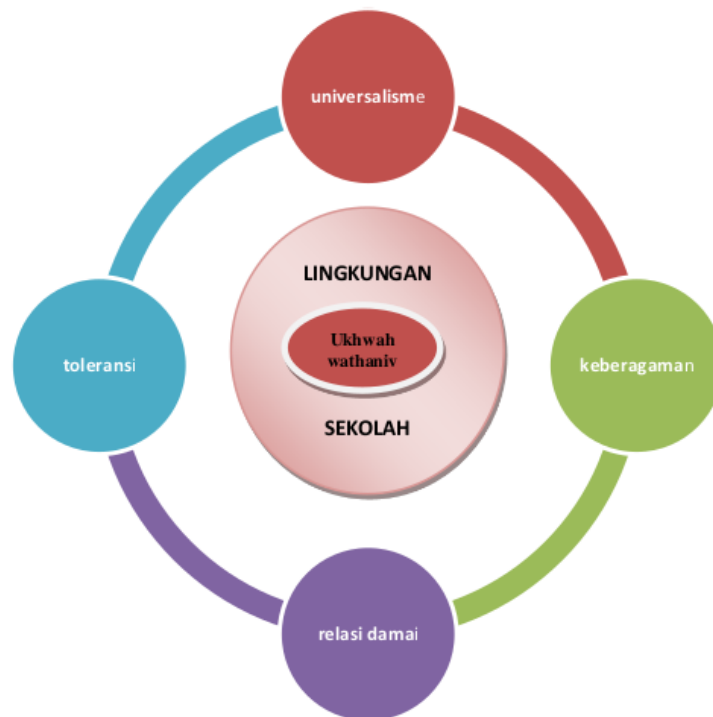
Sebenarnya dominasi tidak hanya bisa datang dari mayoritas tetapi juga bisa datang dari minoritas. Mayoritas bisa juga menjadi minoritas, dan minoritas bisa pula menjadi mayoritas. Dimana kaum minoritas yang lebih tangguh, lebih depresif, lebih ekspansif bisa untuk menundukan kaum mayoritas yang masih terbelakang dalam hal ilmu, pemikiran, dan tindakan. Sedangkan, mayoritas dalam mayoritas adalah dimana kaum mayoritas mempunyai kekuasaan absolut terhadap minoritas, apabila kaum mayoritas menjadi lebih depresif dan agresif terhadap minoritas.

Keberadaan dominasi-dominasi dalam mayoritas-minoritas dan sebaliknya itu, hal ini yang akan menjadi konflik-konflik, baik itu dalam keagamaan, etnis kultural dan seterusnya. Dampak negatif dari dominasi itu, salah satunya menyebabkan deskriminasi, konflik dan perlawanan-perlawanan.

Dalam konteks keindonesiaan pendidikan multikultural harus memperhatikan kondisi seperti ini. Kesadaran-kasadaran mayoritas terhadap minoritas perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari konteks dan kondisi kelokalan yang dibangun di Indonesia. Indonesia yang memiliki tipologi-tipologi lokalitas perlu dipertimbangkan digali sebagai sumber pengembangan pendidikan multikultural. Masalahnya, setiap lokalitas itu pula punya kearifan-kearifan tersendiri dalam menyelesaikan dan memandang perbedaan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari hasil penelitian Hanani (2011:149) ada model-model toleransi beragama yang dibangun oleh masyarakat lokal, seperti di Padang Panjang di Sumatera Barat, komunikasi pasar dengan dialek lokal ternyata telah menyatukan antar etnik dan antar pemeluk agama di daerah tersebut, sehingga rukun dan harmonis. Bahasa menjadi pengikat solidaritas melebihi bangun-bangun toleransi yang diwujudkan dalam kondisi temporer. Dengan bahasa pasar dialek dan dengan kalimat yang sama dalam berbagai hal, seperti kalimat *awak samo awak* (kita sama-sama kita) menjadi perekat dalam segala perbedaan. Di

pasar kalimat itu sangat sering kedengaran diucapkan oleh lintas etnis dan agama, sehingga kalimat itu melahirkan paradigma perkawanan dan kesetiakawanan melintasi etnis dan agama.

Artinya adalah, dalam materi pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kultural yang ada di dalam masyarakat atau peserta didik itu, terutama dimana lingkungan sekolah peserta didik itu berada. Di sinilah seorang guru harus mampu memahami kultur atau budaya tersebut. Dalam pembelajaran multikultural pemerhatian seperti ini disebut dengan *relation of humanity and cultural*. Memperkenalkan kondisi-kondisi keragaman kultural dan keberagaman kultural terdekat itu menjadi perhatian dalam menyusun materi pembelajaran pendidikan kultural.



Gambar 3: Materi Pendidikan Multikultural dalam Konteks Keindonesiaan

Kesimpulan dan saran

Untuk bangsa Indonesia pendidikan multikultural sudah sangat harus direkonstruksi, mengingat bangsa ini terdiri dari beraneka ragam budaya, agama dan keyakinan. Perbedaan itu terbukti menjadi sumber konflik, bahkan sampai pada anarkhir yang menelan

kemusnahan. Menurut Capra, untuk menjaga kepunahan itu berlanjut diperlukan pendidikan moralitas yang dapat memaknai keberagaman tersebut. Pendidikan moralitas itu adalah, pendidikan multikultural, dimana selama ini terabaikan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan multikultural yang diajarkan di sekolah di Indonesia, minimal dapat membangun perilaku toleransi kalangan anak didik sebagai generasi masa depan. Masalahnya di Indonesia toleransi ini yang paling dangkal, sehingga orang mudah bertindak anarkhis. Pertentangan antar kelompok di Indonesia sering berujung dengan perkelahian, pembunuhan dan pemusnahan.

Lebih penting lagi adalah, pendidikan multikultural adalah untuk menjaga keanekaragaman untuk tidak saling berbenturan. Masalahnya perbenturan diantara yang beranekaragam itu sama dengan menghancurkan bangsa ini, karena bangsa ini dibangun di atas yang beraneka ragam tersebut. Oleh sebab itu, menjaga yang beranekaragam tersebut sama dengan menjaga bangsa Indonesia.

Pendidikan multikultural sudah harus dilakukan di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dalam merealisasikan undang-undang pendidikan nasional no 23 tahun 2003. Oleh sebab itu yang sangat mendesak dirumuskan untuk melaksanakan pendidikan multikultural ini adalah; *pertama* masalah kurikulum pendidikan multikultural. *Kedua* mencari format atau bentuk pendidikan multikultural yang sesuai dengan konteks bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia sangat penting artinya dalam rangka menjaga keanekaragaman yang ada. Masalahnya bangsa ini dibangun di atas keanekaragaman itu. Oleh sebab itu, tidak salah terjaganya keanekaragaman sama halnya dengan menjaga bangsa ini.

Pendidikan multikultural tersebut bisa memperkuat ukhwa wathaniyah apabila dilakukan dengan pendekatan Pemaknaan toleransi dan perbedaan keanekaragaman, Universalisme kemanusiaan, Keberagaman sebagai khazanah budaya dan Relasi damai, Dalam konteks sekarang hal itu sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang berkeragaman, etnis, agama, budaya dan seterusnya.

C. Daftar Rujukan

- Achmad. Fedyani Saifuddin. 2006. *Kompas* "Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia"
- Azra. Azyumardi. 2008. Makalah pada simposium Nasional Kementerian Pendidikan Nasional.

17

Bellah, Robert N. 2000. *Beyond Belief Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern*. Paramadina. Jakarta.

16

Banks, James A. 1987. *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Boston: Allyn and Bacon Inc

Bikhu. Parekh, 2001. *Rethinking Multiculturalism*. Harvard University Press

Capra, Fritjof. *Titik Balik Peradaban*. Yogyakarta. Bentang. 200

20

Durkheim, Emile. 1926. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York. The Free Press.

9

Dove, M.R. 1985. *Peranan kebudayaan tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia.

Giddens, Anthony. 1989. *Sociology*. Cambridge. Polty Press

2

Hanani, Silfia. 2011. "Model Konstruksi Toleransi Antar Umat Beragama Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas Pada Masyarakat Perkotaan Kota Padang Panjang Di Sumatera Barat". *Renai*. Salatiga. Percik.

Hanani, Silfia. 2011. *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama*. Bandung. Humaniora.

Hanani, Silfia. 2013. *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Yogyakarta. Arruzmedia

10

Illich, I. 1969. *Celebration of awerness: A call for institutional revolution*. USA. Pantheon Books.

2

Johnson, Paul Doyle 1086. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta. Gramedia.

13

Koentjaraningrat. 198. *Sejarah kebudayaan dan teori antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

21

Naisbitt, John .1994. *Global Paradox*, New York: William Morrow and Company

10

Pals, Daniel L. 2001. *Seven Theories of Religion*. Qalam. Yogyakarta.

Parsons, Talcott. 1986. *Fungsionalisme Imperative*. Jakarta. Cv. Rajawali..

Ritzer, G. & Goodman, J. D. 2005. *Modern sociological theory*. USA: McGraw-Hill.

7

Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta. Kompas

9

Ting-Toomey, Stella. 1999. *Communicating Across Culture*. New York. The Guildford Press.

Wasim, Theria Alef, ed. 2005. *Harmoni Kehidupan Beragama Problem, Parakter dan Pendidikan*. Yogyakarta. OasisPublisher.

Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah Multikultural

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.cml.ui.ac.id

Internet Source

3%

2

ejournal.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

3%

3

selviraseptianti29.blogspot.com

Internet Source

2%

4

sosiologipendidikanku.blogspot.com

Internet Source

1%

5

es.scribd.com

Internet Source

1%

6

www.acehinstitute.org

Internet Source

1%

7

anzdoc.com

Internet Source

1%

8

Submitted to IAIN Surakarta

Student Paper

1%

9

dakwah.unisnu.ac.id

Internet Source

1%

10	repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
12	materi-paksyaf.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	media.neliti.com Internet Source	<1 %
14	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
15	zenodo.org Internet Source	<1 %
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
17	wacanaislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
19	alviemessi.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Univerza v Ljubljani Student Paper	<1 %
21	thephilanthropist.ca Internet Source	<1 %

22	docplayer.info Internet Source	<1 %
23	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
25	ibnupublishing.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	perpustakaan-iainradenfatah09.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
29	datalagi.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	www.jagoanhosting.com Internet Source	<1 %
31	aakkuucintaindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
33	repository.ar-raniry.ac.id	

<1%

34

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off